

## FUNGSI PENGAWASAN KOMISI D DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN CIAMIS

Renny Fatma Dewi<sup>1</sup>, Erlan Suwarlan<sup>2</sup>, Otong Husni Taufiq<sup>3</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

E-mail: [renyfatma15@gmail.com](mailto:renyfatma15@gmail.com)

### ABSTRAK

*Kegiatan pengawasan oleh Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis masih belum optimal dalam menjalankan program triwulannya, sering kali kegiatan pengawasan tidak mencapai target sesuai dengan rencana yang sudah disusun dalam Rencana Aksi Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan studi kepustakaan, untuk mempelajari literatur dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, selanjutnya studi lapangan dengan metode observasi jenis observasi partisipatif, dan metode wawancara dengan teknik yang digunakan yaitu in-depth interview serta melakukan wawancara secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, dan terakhir teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi. Teknik pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini diantaranya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dalam target capaian kegiatannya dilaksanakan secara insidental karena padatnya jadwal kegiatan di Komisi D, masih ditemukan pegawai yang kurang disiplin, dilihat dari tingkat kehadiran pegawai dalam bekerja, serta belum adanya mekanisme yang lengkap terkait fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap mitra kerja Dinas Pendidikan sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sulit diukur.*

**Kata Kunci:** Fungsi Pengawasan, Pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

### ABSTRACT

*Activity supervision by Commission D of the Regency DPRD Nice Still not optimal yet runs its quarterly program, often activities supervision No achieve the appropriate target with plan already \_ arranged in Plan Action Year 2021. Research This use method study qualitative with approach descriptive. For collect research data use studies library, for learn literature And other relevant sources with problem under study, next studies field with method observation type observation participatory, and method interview with technique used \_ namely in-*

*depth interviews as well do interview in a manner structured with use guidelines interview , and final technique data collection with do documentation . Technique processing or deep data analysis study This among them data reduction , data presentation , and withdrawal conclusion . Results study This show that function supervision carried out by Commission D Council District People's Representative Nice in the achievement target activities held in a manner incidental Because dense timetable activities in Commission D, still found less employees \_ discipline , seen from level presence employee in work . as well as Not yet exists complete mechanism \_ related function supervision carried out by Commission D Council Regional People's Representatives to partners Work Service Education so that success in implementation function supervision difficult measured .*

**Keywords :** *Function Oversight, Education, Board Regional People's Representatives*

## **PENDAHULUAN**

Pengawasan dalam suatu sistem pemerintahan daerah adalah untuk menjamin terlaksananya segala keperluan perundang-undangan, peraturan, keputusan kebijakan, dan peraturan daerah itu sendiri. Selama suatu sistem beroperasi dalam batas-batas standar yang diterima atau dalam kondisi keseimbangan, pengawasan juga digunakan untuk menjaga agar hal-hal tetap terkendali dan untuk memberikan gambaran tentang apa yang dapat diandalkan, diterima, atau bahkan dipaksakan. Kisaran nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah yang diizinkan oleh suatu sistem sebagai batas toleransi dan masih memberikan hasil yang dapat diterima adalah batas kendali. Hasil pengawasan dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau masukan untuk perubahan rencana baik sebelum maupun sesudah rencana tersebut diimplementasikan. Agar entitas pemerintah berfungsi dengan

sukses, efisien, dan ekonomis, maka harus dilaksanakan pengawasan.

Untuk pertama kalinya, keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam bentuk Perda harus diawasi oleh lembaga perwakilan seperti DPRD. Perlu ditentukan apakah pemerintah daerah yang bertindak sebagai pelaksana cukup layak untuk melaksanakan keputusan tersebut. Kedua kesalahan tersebut merupakan hasil dari kekuasaan rakyat yang dijalankan oleh DPRD.

DPRD dipisahkan menjadi komisi-komisi untuk menjalankan proses kerja sehari-hari karena jangkauan tugas dan kerumitannya. Untuk membantu pelaksanaan pengurusan DPRD yang meliputi koordinasi dan pembagian kerja guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang maksimal, pembagian ke dalam komisi-komisi tersebut merupakan kebutuhan yang realistis dari sebuah organisasi besar. Berdasarkan pada urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, komisi memiliki ruang lingkup khusus, berbeda dengan DPR yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya bersifat nasional dan internasional.

Menurut Bangun (2008:164-166) terdapat 4 (empat) sistem pengawasan yang pada dasarnya sama untuk setiap bidang pekerjaan. Proses pengawasan meliputi empat langkah, antara lain: (1) menetapkan standar, (2) mengukur prestasi kerja, (3) menyesuaikan prestasi kerja dengan standar, dan (4) mengambil tindakan korektif.

Menetapkan standar berarti menetapkan apa yang harus dilakukan setiap anggota pada sebuah organisasi. Standar adalah kriteria yang sederhana dalam menilai suatu pekerjaan. Analisis pekerjaan juga disebut sebagai (Job Analysis), dapat dinyatakan dengan kuantitas, kualitas, waktu penyelesaian dan kehadiran. Pelaksanaan mengukur prestasi kerja merupakan kegiatan menilai pekerjaan individu atau kelompok dalam organisasi. Proses ini dapat dilakukan dengan menentukan jumlah unit yang harus dibuat setiap individu atau kelompok dalam organisasi. Langkah termudah dalam proses pengawasan adalah menyesuaikan prestasi kerja dengan standar, yaitu dengan melakukan perbandingan antara hasil dengan standar yang sudah ditentukan. Mengambil tindakan korektif, dapat dilakukan dengan mengubah standar yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011), pendidikan harus dapat diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk mencapai pemerataan, memperluas akses, meningkatkan mutu, dan relevansi, serta memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sebagai suatu sistem pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 2 adalah untuk menumbuhkan kompetensi diri dan membentuk karakter warga negara yang berbudi luhur, mencerdaskan, dan bermartabat guna mewujudkan kehidupan yang ber peradaban. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Komisi D DPRD dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis masih belum optimal dalam menjalankan program triwulannya, sering kali kegiatan pengawasan tidak mencapai target sesuai dengan rencana yang sudah disusun dalam Rencana Aksi Tahun 2021. Adapun kendala dari belum optimalnya fungsi pengawasan tersebut,

salah satunya karena masih dalam pandemi Covid-19, artinya terjadi pembatasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah dan masyarakat yang berdampak terhadap realisasinya.

Target capaian kinerja dan realisasi anggaran program Tahun 2021 pada program kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dibagi kedalam Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV. Berikut tabel capaian kinerja kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada bidang kesejahteraan rakyat:

**Tabel 1. 1**

**Target Capaian Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2021**

No	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
	Capaian Kinerja							
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	20 kali	7 kali	10 kali	10 kali	10 kali	15 kali	10 kali	17 kali

*Sumber: Laporan Evaluasi Renja Triwulan I, II, III, IV Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2021.*

Dilihat dari tabel di atas, bahwasanya kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pada bidang kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya optimal, karena capaiannya tidak terlaksana sesuai target baik itu kurang maupun melebihi target. Dengan demikian penting untuk meneliti terkait permasalahan pelaksanaan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi, terlihat bahwa kegiatan fungsi pengawasan Komisi D DPRD dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis belum optimal, hal itu terlihat dari:

1. Pelaksanaan pengawasan belum memiliki standar pengukuran yang jelas. Hal ini terlihat dari standar pengukuran di lapangan masih belum optimal.
2. Target pengawasan yang kurang optimal. Hal ini terlihat dari capaian kegiatan pengawasan yang tidak terlaksana sesuai target.
3. Kegiatan tindakan koreksi tidak dilaksanakan dengan optimal. Hal ini terlihat dari kegiatan pengawasan yang hanya dilaksanakan secara lisan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Fungsi Pengawasan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Ciamis?”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengawasan**

Pengawasan merupakan bagian penting dari manajemen, yang mencakup penentuan apa yang harus dilakukan, melakukan penilaian dan melakukan perbaikan untuk memastikan bahwa tindakan yang telah diambil dapat dilaksanakan dengan baik.

Pengertian pengawasan yang dikemukakan Mockler (dalam Fauzi 2014:206) merupakan proses sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi maupun umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien untuk pencapaian tujuannya.

Pengawasan merupakan tindakan yang berfungsi untuk memantau, memeriksa, dan melakukan tindakan korektif dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak dan kepentingan umum agar dapat dicapai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

### **Fungsi Pengawasan**

Fungsi pengawasan penting untuk menanamkan sosialisasi tentang perlunya sikap disiplin dan mematuhi semua peraturan untuk menjaga keselamatan kerja bersama. Menurut Suadi, A (2014:23) secara lebih detail fungsi pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana manajemen untuk mengevaluasi seberapa efektif pengendalian yang telah diterapkan;
- b. Untuk mengevaluasi apakah organisasi telah berjalan sesuai

dengan aturan-aturan yang ditetapkan seperti yang dilaporkan oleh pelaksana tugas organisasi;

- c. Untuk mengevaluasi apakah setiap bagian dari manajemen telah mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk mengetahui apakah pekerjaan telah diselesaikan dengan efektif dan efisien;
- e. Untuk mengetahui apakah tujuan organisasi telah tercapai.

Sedangkan menurut Rusdiana, dan Ghazin (2014:211) berikut adalah beberapa fungsi utama yang dilakukan pada saat pengawasan:

- 1) Mencegah berbagai kesalahan atau penyimpangan; artinya pengawasan dapat mencegah kemungkinan terjadinya berbagai penyimpangan, kesalahan, serta penyelewengan.
- 2) Memperbaiki berbagai penyimpangan dan kesalahan yang terjadi; artinya dengan adanya pengawasan, dapat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, agar tidak berlarut-larut, mengakibatkan kerugian organisasi
- 3) Memperkuat rasa tanggung jawab terhadap karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang diberikan. Selain itu, laporan tertulis tentang penyimpangan dapat membantu meningkatkan rasa tanggung jawab.

- 4) Mendinamisasikan organisasi serta semua kegiatan manajemen lainnya, yaitu dengan adanya pengawasan diharapkan sedini mungkin terjadinya penyimpangan dapat dicegah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan mencakup analisis, penilaian, saran, dan penyampaian hasil laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang diteliti. Fungsi pengawasan juga berfungsi untuk mencegah banyak kemungkinan terjadinya penyimpangan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan tersebut dengan meningkatkan rasa tanggung jawabnya terhadap tugas dan kewajibannya.

#### **Teknik-Teknik Pengawasan**

Teknik-teknik pengawasan menurut Makmur (2015:193) dijelaskan sebagai berikut:

1. Teknik pemantauan, dalam pengawasan teknik pemantauan dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kesalahan dalam penggunaan teknik ini dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan hasilnya bukan memberikan kebenaran, akan tetapi kekeliruan yang berdampak negatif.
2. Teknik pemeriksaan, dalam pengawasan teknik pemeriksaan ini dapat digunakan untuk menentukan suatu tindakan berjalan dengan baik atau mengalami masalah pada saat pelaksanaannya, dan juga dapat

memberikan hasil yang maksimal atau gagal dalam mencapai hasil yang diharapkan.

3. Teknik penilaian, untuk menilai pelaksanaan pengawasan, teknik penilaian harus dilakukan dengan tepat, adil dan jujur. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan benar tanpa adanya penyimpangan.
4. Teknik Pengamatan dalam pengawasan, dapat diartikan untuk membuktikan keterkaitan antara informasi dan data yang diperoleh dengan situasi nyata, baik yang berkaitan dengan individu maupun kelembagaan. Teknik pengamatan dalam pengawasan perlu untuk dilakukan pengamatan dengan cermat sehingga apa yang diamatai dapat terlihat dengan baik..
5. Teknik pelaporan, dalam teknik pelaporan pengawasan, setiap kegiatan yang dilakukan oleh berbagai lembaga selalu dilaporkan sesuai dengan yang dilakukan. Laporan ini merupakan pelaksanaan pengawasan.

Dapat disimpulkan bahwa suatu proses pengawasan akan berjalan baik dengan menjalankan setiap teknik-teknik yang ada dalam pengawasan. Teknik-teknik pengawasan ini adalah langkah awal untuk menghindari adanya penyimpangan yang akan menghambat pencapaian tujuan dari setiap kegiatan sehingga setiap

perencanaan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### **Proses Pengawasan**

Menurut Belkaoui (dalam Marhawati. 2018:19) langkah-langkah umum yang diikuti dalam proses pengawasan diantaranya:

1. Penyusunan tujuan.
2. Penetapan standar.
3. Pengukuran hasil kerja.
4. Perbandingan fakta dengan standar.
5. Perbaikan tindakan koreksi.

Selanjutnya menurut Bangun (2008:164-166) terdapat 4 (empat) sistem pengawasan yang pada dasarnya sama untuk setiap bidang pekerjaan. Proses pengawasan meliputi empat langkah, antara lain:

1. Menetapkan Standar, merupakan langkah awal dalam pengawasan dimana ini menjadi pedoman untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak. Menetapkan standar berarti menetapkan apa yang harus dilakukan setiap anggota pada sebuah organisasi. Standar adalah kriteria yang sederhana dalam menilai suatu pekerjaan. Analisis pekerjaan juga disebut sebagai (*Job Analysis*), dapat dinyatakan dengan kuantitas, kualitas, waktu penyelesaian dan kehadiran.
2. Mengukur Prestasi Kerja, berarti menilai kinerja individu atau kelompok dalam organisasi. Proses yang dilakukan secara berulang-ulang dan berlangsung secara terus-menerus pengukuran ini dapat

dilakukan tergantung pada jenis kegiatan yang diukur, yaitu dengan menentukan jumlah unit yang harus dibuat setiap individu atau kelompok.

3. Menyesuaikan Prestasi Kerja dengan Standar, adalah langkah termudah dalam proses pengawasan dengan hanya membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang sudah ditetapkan.
4. Mengambil Tindakan Korektif, jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Tindakan ini dilakukan dengan mengubah standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan kesalahan dalam analisis pekerjaan yang menyebabkan kesalahan dalam menetapkan standar kerja. Perubahan juga dapat dilakukan dengan mengukur prestasi kerja dan mengubah metode analisis untuk menghitung perbedaan antara hasil yang dicapai dengan standar.

### **Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Selain memiliki tanggung jawab mengenai legislasi dan anggaran, DPRD juga memiliki tanggung jawab utama untuk melakukan pengawasan. Seharusnya aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, sudah terwakili oleh anggota DPRD. Pengawasan DPRD bertujuan untuk meningkatkan demokrasi, menjamin keterwakilan

rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, menciptakan mekanisme *check and balance* antara DPRD dengan eksekutif untuk memastikan bahwa keadilan dan kemakmuran rakyat tercapai.

Menurut Makmur (2015:178), pengawasan adalah cara berpikir dan bertindak yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia (Human resourch) maupun bukan sumber daya manusia (Nonhuman Resourch) yang terangkum dalam istilah unrus manajemen..

Dari pernyataan di atas bahwa pengawasan adalah suatu pola pikir yang bertujuan untuk mengendalikan sumber-sumber yang termuat dalam manajemen di suatu organisasi. Dengan adanya pengawasan seperti ini dapat memberikan ketenangan karena terjaminnya semua pelaksanaan yang terjadi di lapangan.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber penelitian ini, dimana data diperoleh langsung dari Komisi D DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini menggunakan eknik pengumpulan data melalui Studi Kepustakaan dan studi lapangan yang mana dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan atau analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kapasitasnya sebagai salah satu komponen penyelenggara pemerintah daerah, Komisi D DPRD memiliki beberapa fungsi yang harus dilaksanakan sebagai tugas utamanya penyelenggara pemerintahan daerah. Pertama yaitu Fungsi Pembentukan PERDA (Peraturan Daerah), dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi sebagai lembaga yang bersama-sama Kepala Daerah dapat membentuk peraturan daerah, baik yang merupakan inisiatif kepala daerah maupun inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu sendiri, dan yang kedua adalah Fungsi Anggaran, yang mana fungsi ini dilakukan untuk menyusun, membentuk dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dimana fungsi ini juga dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah.

Untuk mengetahui fungsi pengawasan Komisi D dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis, yang pada penelitian ini lebih difokuskan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, hambatan yang dialami dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan di lapangan. Maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan dimensi-dimensi



menurut Bangun (2008:164-166) yaitu sebagai berikut:

### **1. Menetapkan Standar**

Bangun, W (2008:164-166) Menetapkan Standar, merupakan langkah awal dalam pengawasan dimana ini menjadi pedoman untuk mengetahui apakah ada penyimpangan atau tidak. Standar kerja dapat diketahui melalui analisis pekerjaan (analysis job), dan dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas, waktu pengerjaan maupun jumlah kehadiran.

#### **a. Tersedianya Standar Operasional Prosedur**

Arnina, P (2016:30) menyatakan bahwa SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme, dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemudian, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kinerja Dinas Pendidikan sudah dijalankan sesuai dengan Standar Operasional yang ditetapkan, dan sudah memberikan pengawasannya dengan baik.

#### **b. Adanya target pengawasan**

Maharani, A (2020:3) mengungkapkan Target Capaian adalah gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program untuk mewujudkan, tujuan, visi dan misi organisasi. Berdasarkan teori yang telah diungkapkan tersebut, dan hasil

dari penelitian diperoleh bahwa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis membuat target capaian kegiatan dalam Rencana Kerjanya, akan tetapi capaian kegiatan tersebut dibuat secara umum untuk seluruh mitra kerja, kegiatan fungsi pengawasan ini kebanyakan dijalankan secara insidental, dan terkadang kegiatan pengawasan terhambat oleh padatnya jadwal serta prioritas lain yang ada di Komisi D. Namun dengan adanya hambatan yang ditemukan disetiap proses pelaksanaan target pengawasan, maka Komisi D langsung melakukan penataan kembali perencanaan pengawasan dengan memaksimalkan waktu yang ada.

#### **c. Adanya kuantitas yang hendak dicapai, berkenaan dengan jumlah pekerjaan yang dihasilkan pegawai**

Dharma dalam Nadiro (2014:35) menjelaskan kuantitas adalah jumlah pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang ditetapkan. Maka didasarkan kepada kedua definisi ahli tersebut, hasil penelitian menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan hal mengenai kuantitas sebuah pekerjaan perlu untuk diawasi, hal ini sebagai tolak ukur penilaian untuk mencapai keberhasilan dari apa yang menjadi standarnya. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih ditemukan ketidaktercapaian kuantitas tersebut, dengan adanya pekerjaan yang tidak dijalankan sesuai dengan tupoksinya,

maka dari itu Komisi D yang bermitra dengan Dinas Pendidikan selalu memberikan arahan yang terbaik agar semua pekerjaan dijalankan dengan sempurna.

d. Adanya kualitas yang dihasilkan, mencakup waktu kerja dan ketepatan dalam melaksanakan kerja

Marcana dalam Ceswirdani (2017:4) mengungkapkan kualitas kinerja terdiri dari perilaku atau kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara Lupiyoadi dan Hamdani (2011:162) mengemukakan kualitas kinerja didefinisikan sebagai tingkat kinerja yang ditunjukkan oleh karyawan untuk mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan pengertian para ahli, maka dalam penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil bahwa bahwa Komisi D melakukan pengawasan terhadap kuanlitas kinerja yang dihasilkan Dinas Pendidikan dilihat dari aspek kehadiran, lama waktu kerja dan skill pegawai

## **2. Mengukur Prestasi Kerja**

Bangun, W (2008:164-166) Mengukur Prestasi Kerja, berarti menilai pekerjaan yang dikerjakan oleh individu atau kelompok dalam organisasi, dengan menentukan jumlah unit yang harus dihasilkan setiap individu atau kelompok.

a. Melakukan pengujian/Test, dengan mengambil salah satu pegawai sebagai sampel

Kadir, A (2015:71) tes merupakan cara atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian. Selanjutnya Arikunto dalam Kadir (2015:71) mengatakan bahwa tes yang baik harus mempunyai syarat-syarat tertentu, diantaranya harus efisien, harus baku, mempunyai norma, objektif, valid dan reliabel.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hampir semua mengatakan bahwa pengambilan sampel tidak dilakukan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena hal tersebut bukan ranahnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan melalui tes atau pengujian terhadap salah satu pegawai dilakukan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ditemukan di lapangan, akan tetapi bukan bagian dari Komisi D, kegiatan pengujian tersebut dilakukan oleh instansi lain yang sudah memiliki wewenang.

b. Melakukan pengukuran kinerja

Sigilipu, S (2013: 241) Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk mengevaluasi hasil akhir dari program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa mereka telah memenuhi dan mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Komisi D Dewan perwakilan Rakyat Daerah terhadap Dinas pendidikan, dilakukan

salah satunya dengan mengukur standar dari setiap program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan.

c. Melakukan inspeksi langsung di lapangan

Kurniasyah, R (2022) menjelaskan inspeksi merupakan proses pemeriksaan langsung untuk melihat dan mengawasi langsung tentang pelaksanaan peraturan, regulasi, dan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengawasan di lapangan dilakukan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan didampingi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

d. Adanya laporan dalam bentuk pengukuran harian, mingguan atau bulanan secara lisan maupun tertulis

Utami, R.A (2018:64) mengatakan bahwa menilai atau mengukur suatu kegiatan dapat dilakukan dengan melalui laporan, baik lisan maupun tertulis, buku catatan tentang pekerjaan itu, dapat berupa bagan jadwal atau grafik produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survey yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu atau menilai penggunaan alat teknis.

Berdasarkan hasil penelitian, jawaban laporan dari Dinas Pendidikan hanya disampaikan secara lisan, untuk laporan tertulisnya itu dibuat dalam bentuk RPJMD.

### **3. Menyesuaikan Prestasi Kerja dengan Standar**

Bangun, W (2008:164-166) Menyesuaikan Prestasi Kerja dengan Standar, merupakan langkah termudah dalam proses pengawasan dengan hanya membandingkan hasil pekerjaan dengan standar yang sudah ditetapkan.

a. Menganalisa penyimpangan yang terjadi

Becker dalam Munawaroh (2010:73) Penyimpangan merupakan sebagai suatu konsekuensi dari penerapan aturan-aturan dan sanksi oleh orang lain kepada pelanggar.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa apabila ditemukan penyimpangan atau kendala yang menghambat ketercapaiannya yang menjadi standar Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis maka dari Komisi D melakukan koreksi terlebih dahulu yang nantinya akan dicarikan solusi.

b. Membandingkan hasil pekerjaan

Sakti, F.T, dkk (2018:16) menjelaskan bahwa membandingkan hasil pekerjaan berarti mengevaluasi hasil pekerjaan.

Berdasarkan penelitian yang telah yang dilaksanakan, maka mendapati hasil bahwasannya jawaban kegiatan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar selalu dilakukan oleh Komisi D terhadap Dinas Pendidikan.

### **4. Mengambil Tindakan Korektif**

Bangun, W (2008:164-166) Mengambil Tindakan Korektif, jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan standar, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Tindakan ini dilakukan dengan

mengubah standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan karena ada kemungkinan kesalahan dalam analisis pekerjaan yang menyebabkan kesalahan dalam menetapkan standar kerja. Perubahan juga dapat dilakukan dengan mengukur prestasi kerja dan mengubah metode analisis untuk menghitung perbedaan antara hasil yang dicapai dengan standar.

a. Pengambilan tindakan korektif

Kamil, R, dkk (2021:39) Tindakan korektif merupakan tahapan yang dilakukan secara insidental, karena tidak selalu dilakukan. Tindakan korektif ini dilakukan untuk memperbaiki kinerja atau hasil dari suatu kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis segera melakukan tindakan koreksi pada setiap kegiatan karena sudah menjadi tanggung jawab mereka untuk mengoreksi kegiatan yang tidak sesuai.

b. Adanya perbaikan penyusunan rencana atau standar baru

Handoko dalam Ismail, A (2022:285) menjelaskan bahwa tindakan korektif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, diantaranya standar yang diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan tindakan korektif dilaksanakan tanpa mengubah dan membuat standar baru.

Berdasarkan uraian dari setiap indikator di atas maka dapat

disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan pendidikan yang dalam penelitian ini difokuskan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis secara keseluruhan telah menjalankannya dengan baik sesuai dengan Standar yang diturunkan Kepada Komisi D DPRD dalam setiap programnya untuk menghasilkan pembangunan yang baik seperti halnya fakta di lapangan Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis menjalin komunikasi dan koordinasi di setiap kegiatan, melakukan pengukuran kinerja di lapangan, inspeksi langsung untuk mendapatkan laporan secara nyata agar dapat dikoreksi secara langsung di lapangan dengan harapan program kerja yang dijalankan dapat diselesaikan tepat waktu. Karena pada dasarnya fungsi pengawasan bagi Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini untuk meminimalisir tingkat penyimpangan di lapangan dan dilakukan tindakan korektif dengan segera.

## **KESIMPULAN**

Fungsi pengawasan komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya dijalankan secara optimal. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa fungsi pengawasan sebagian besar dilakukan secara insidental, dan terkadang kegiatan pengawasan terhambat oleh padatnya jadwal kegiatan dari Komisi D, selain itu adanya temuan-temuan di lapangan bahwa dalam pelaksanaan

kinerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis masih ditemukan pegawai yang kurang disiplin, dilihat dari tingkat kehadiran pegawai dalam bekerja. Berdasarkan hasil penelitian, kehadiran pegawai masih harus ditingkatkan karena masih ditemukan adanya pegawai yang tidak masuk kerja, sehingga hal ini dapat mengganggu kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis dalam memberikan pelayanan kepada pihak yang membutuhkan.

Meskipun masih belum mencapai target pengawasan sesuai dengan perencanaan, Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis selalu berusaha memaksimalkan waktu disetiap kegiatannya, dan melakukan penataan kembali perencanaan pengawasan serta memberikan arahan yang terbaik agar semua dijalankan sesuai dengan target.

Mekanisme yang memuat tentang menetapkan standar, mengukur prestasi kerja, menyesuaikan prestasi kerja dengan standar, dan mengambil tindakan korektif yang dilaksanakan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis belum diatur secara menyeluruh sebagai langkah strategis Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi secara berkala mengenai program kesejahteraan masyarakat. Belum adanya mekanisme yang lengkap terkait fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap mitra kerja Dinas Pendidikan sehingga keberhasilan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sulit diukur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

- Arnina, P. (2016). *Langkah-Langkah Efektif Menyusun SOP*. Huta Publisher.
- Bangun, W. (2008). *Intisari Manajemen*. Bandung. Refrika Aditama.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani, A. (2011). *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta: Selemba Empat.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Marhawati, B. (2018). *Pengantar Pengawasan Pendidikan*. Deepublish.
- Sigilipu, S. (2013). *Pengaruh Penerapan Informasi Akuntansi Manajemen dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi. 1(3).
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rusdiana, A, & Ahmad Ghazin, A. (2020). *Asas-asas Manajemen Berwawasan Global*. Bandung; CV. Pustaka Setia.
- Suadi, A. (2014). *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Press.

**Jurnal:**

Fauzi, H. A. (2016). *Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 11(2).

Ismail, A., & Bas, A. H. M. (2022). Efektivitas Pengawasan Berbasis Kinerja di Dinas Sosial Kota Makassar. *Journal of Applied Management and Business Research (JAMBiR)*. 2(3). 284-289.

Kadir, A. (2015). *Menyusun dan Menganalisis Tes Hasil belajar*. Al-Ta'dib: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan. 8(2). 70-81.

Kamil, R. N., Ningrum, S., & Buchori, A. (2021). *Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) oleh Satuan Kerja Kota di Kota Bandung*. JANE (Jurnal Administrasi Negara), 13(1). 36-40.

Kurniansyah, R. (2022). *Implementasi Kegiatan Inspeksi Otoritas Bandar Udara terhadap Pengawasan dan Pengendalian Delay Management Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta*. Flight Attendant Kedirgantaraan: Jurnal Public Relation, Pelayanan, Pariwisata. 41(1). 103-108.

Nadiro, H. (2014). *Pengaruh Etos Kerja Islam Terhadap Kualitas Kerja Karyawan Melalui Kinerja: Studi pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Malang* (Doctoral Dissertation,

Yniversitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Maharani, A. (2020). *Upaya Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).

Munawaroh, S. (2010). *Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa tengah*. Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi. 4(2).

Sakti, F.T., & Fauzia, S. N. (2018). *Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut)*. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 8(1). 160-173.

Utami, R.A., Amiruddin, S., & Budiati, A. (2018). *Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unit Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Serang I Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada PT. Beesfootwear Inc.* (Doctoral Dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

**Dokumen Resmi:**

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

**Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan**

Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023

ISSN: 2442-3777 (cetak)

Website: <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>

ISSN: 2622-691X (online)

Submitted 1 Agustus 2023, Reviewed 23 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (581-595)

Rencana Aksi Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2021.  
Renstra Dinas Pendidikan 2019-2024  
Laporan Evaluasi Renja Triwulan I,II, III, IV Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun 2021.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis 2022.